



WTP tak Jamin Bebas Penyelewengan ✓

JAKARTA (HR)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, bagi kementerian atau lembaga pemerintah yang telah menyabet opini audit keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak menutup kemungkinan untuk terbebas dari penyelewengan.

Ketua BPK Rizal Djalil mengaku, saat ini masih ada adanya laporan hasil audit di beberapa instansi pemerintah yang telah mendapatkan opini WTP namun penyimpangan tersebut juga ikut meningkat.

"Walaupun WTP bukan berarti tidak ada penyimpangan karena trennya sama-sama naik," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).

Dirinya mencontohkan,

peningkatan penyelewengan pada instansi pemerintah tersebut juga karena dilakukan dengan terorganisir dengan baik. "Lihat Pak Jero, memang persoalannya masif dan terstruktur," tambahnya.

Oleh karena itu, Rizal menuturkan, ke depannya BPK akan menindak langsung terhadap sesuatu yang memiliki indikasi tindakan pidana korupsi (tipikor). Dirinya pun mengungkapkan, langkah yang akan dilakukan BPK untuk mengaudit tidak hanya dilihat dari besaran dana namun dilihat juga dari sensitivitas instansi tersebut.

"Seperti Kementerian Agama yang nilainya hanya Rp22 miliar, dari segi nilai ini kecil, tapi kan sensitif," pungkasnya. (okz/ara)